

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak fundamental bagi setiap individu, terlepas dari usia, waktu, gender, ras, kondisi ekonomi, sosial-budayadan faktor-faktor lainnya. Pendidikan sendiri merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk membentuk manusia yang berkarakter dan menyiapkan manusia untuk mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan pengertian pendidikan yang tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan juga menjadi salah satu cara atau upaya yang dilakukan guna mencapai salah satu tujuan dari Bangsa Indonesia. Adapun tujuan yang dimaksud tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bisa dicapai melalui pendidikan dengan melakukan kegiatan pembelajaran.

Pendidikan Indonesia terbagi menjadi tiga jalur, sesuai dengan yang tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal seperti SD, MI, SMP, MTs, SMA maupun MA. Pendidikan nonformal merupakan pendidikan di luar jalur perlembaga pendidikan formal, seperti, pendidikan kesetaraan, PAUD, pendidikan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat, kursus dan pelatihan, keaksaraan fungsional, dan lain sebagainya. Sedangkan pendidikan informal merupakan pendidikan yang berlangsung di dalam

keluarga. Semua jalur pendidikan ini tentunya akan saling melengkapi dan menguatkan satu sama lainnya

Akses terhadap pendidikan yang berkualitas tentunya menjadi prioritas nasional. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak maupun orang dewasa yang mengalami kendala dalam mengakses pendidikan formal. Fenomena anak tidak sekolah (ATS) atau *out-of-school children* (OSC) masih menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius. Faktor ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi banyaknya anak yang tidak bersekolah hal ini karena kondisi ekonomi keluarga yang tergolong berkekurangan seringkali mendorong anak-anak untuk meninggalkan bangku sekolah. Selain itu, faktor lain seperti pernikahan dini, keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas dan iklim sekolah yang tidak kondusif akibat perundungan juga turut berkontribusi (Yanto, 2026, hlm. 2182-2183).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pendidikan non formal khususnya program pendidikan kesetaraan hadir sebagai solusi alternatif yang krusial. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memainkan peran vital sebagai salah satu satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri (Almaidah, 2017, hlm. 163). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) secara konseptual berbasis masyarakat dan dituntut untuk selalu melakukan inovasi-inovasi untuk melahirkan program-program pemberdayaan masyarakat yang lebih baru, berkarakter transformatif, dan dapat menjadi *best practice* dengan tidak meninggalkan karakteristik kearifan dan keunggulan lokal sebagai *added values* untuk mencerdaskan dan sekaligus mensejahterakan kehidupan masyarakat (Rizka & Tamba, 2015, hlm. 1). PKBM menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan formal atau putus sekolah, dengan mengoptimalkan fasilitas pembelajaran seperti kelompok belajar, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan perempuan. Program pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan juga dapat memberikan kesempatan bagi warga belajar untuk memperoleh ijazah yang bisa membuka pintu menuju pendidikan yang lebih tinggi atau lapangan kerja.

Suatu PKBM harus mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didiknya. Kualitas pendidikan tidak akan terlepas dari manajemen atau pengelolaan PKBM. Pengelolaan yang dilakukan di PKBM harus selalu memperhatikan perubahan yang terjadi. pengelola dan tutor juga dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Hal ini dimaksudkan agar PKBM mampu memberikan pelayanan yang maksimal, mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya dan tentunya mampu menghasilkan lulusan relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Hal ini menuntut PKBM untuk tidak hanya fokus pada penyampaian materi, melainkan juga pada pengembangan kecakapan hidup (*Life skill*) dan kemandirian warga belajar. Luasnya cakupan pembelajaran di PKBM ini mengharuskan dalam penyelenggaraan program harus ada pengembangan strategi dan model pembelajaran. Selain itu, kondisi warga belajar yang beragam, mulai dari usia, latar belakang pendidikan hingga motivasi menuntut pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan adaptif (Sutisna, 2016, hlm. 167).

Aspek penting lainnya dalam menjamin kualitas pendidikan adalah penilaian pembelajaran. Penilaian bukan hanya untuk mengukur hasil akhir, melainkan juga merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi (Hermawan & Suryono, 2016). Perencanaan penilaian pembelajaran yang matang sangat penting untuk memastikan bahwa penialain tersebut relevan, adil, dan mampu meberikan gambaran yang akurat mengenai pencapaian kompetensi warga belajar. Dalam konteks PKBM dan Paket C, perencanaan penilaian harus mempertimbangkan karakteristik unik warga belajar dan tujuan pembelajaran kesetaraan. Penilaian yang efektif data membantu tutor dalam memetakan kemajuan warga belajar, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan meyesuaikan strategi pembelajaran. tanpa perencanaan yang jelas, penilaian dapat menjadi sekadar formalitas tanpa memberikan dampak signifikan terhadap mutu pembelajaran.

Eksistensi pendidikan nonformal di Indonesia, khususnya program kesetaraan Paket C yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), memegang peranan krusial sebagai jembatan penuntaskan masalah anak tidak sekolah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, dalam

realitas penyelenggaraannya di tingkat nasional, aspek penilaian pembelajaran masih sering kali dihadapi oleh kesenjangan yang cukup lebar antara idealisme regulasi dengan implementasi di lapangan. Penilaian pembelajaran yang idealnya merupakan bagian integral dari proses berkelanjutan sejak tahap perencanaan, kerap kali dalam tataran makro di Indonesia hanya terjebak sebagai formalitas administratif demi pemenuhan dokumen akreditasi semata. Perencanaan penilaian belum sepenuhnya diarahkan secara holistik untuk memetakan capaian kompetensi warga belajar, melainkan cenderung berorientasi jangka pendek pada angka-angka kelulusan ujian akhir. Akibatnya, esensi dari asesmen itu sendiri kehilangan daya dukungnya dalam memberikan umpan balik substantif untuk perbaikan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan.

Tantangan sistemik ini diperparah oleh adanya benturan antara standarisasi penilaian nasional dengan karakteristik unik warga belajar di lapangan. Di satu sisi, regulasi menuntut PKBM untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi lewat instrumen digital seperti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Di sisi lain, potret warga belajar Paket C di seluruh Indonesia sangat heterogen, baik dari segi rentang usia, latar belakang sosial-ekonomi, motivasi, hingga tingkat literasi digital yang masih timpang. Ketika tuntutan standarisasi dipaksakan tanpa didasari oleh kesiapan perencanaan penilaian yang matang dari pihak lembaga, maka penilaian tersebut justru berisiko menjadi beban bagi warga belajar. Hal ini diperumit oleh fakta kompetensi pedagogik rata-rata tutor nonformal yang masih terbatas, di mana sebagian besar tutor belum memiliki kecakapan yang memadai dalam menyusun dan mengintegrasikan rubrik penilaian yang dapat mengukur kecakapan hidup (*life skill*) serta kemandirian warga belajar secara adil dan adaptif.

Dinamika dan problematika makro di tingkat nasional tersebut nyata-nyata terefleksi secara nyata dalam lokus penelitian di PKBM GEMA. Sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal yang mengelola program Paket C, PKBM GEMA dihadapkan pada tuntutan besar untuk mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, melainkan juga memiliki keunggulan non-akademik seperti jiwa kewirausahaan. Kendati demikian, pada tahap krusial yaitu perencanaan penilaian, lembaga ini masih membentur dinding kendala terkait bagaimana merumuskan

strategi penilaian yang mampu membuktikan kecakapan kewirausahaan tersebut secara konkret dan objektif. PKBM GEMA juga tidak luput dari kendala keterbatasan infrastruktur teknologi serta variasi tingkat literasi digital di kalangan tutor maupun warga belajarnya sendiri. Tanpa adanya perencanaan penilaian pembelajaran yang komprehensif, transparan, dan disesuaikan dengan konteks institusi lokal, proses evaluasi yang berjalan di PKBM GEMA dikhawatirkan akan kehilangan arah dan sekadar menjadi penggugur kewajiban.

Melihat kompleksitas dan pentingnya peran penilaian dalam pendidikan kesetaraan, penelitian mengenai **“Implementasi Perencanaan Penilaian Pembelajaran pada Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di PKBM GEMA”** menjadi sangat relevan. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi bagaimana perencanaan penilaian pembelajaran yang dilakukan di PKBM GEMA, tantangan apa saja yang dihadapi, serta bagaimana perencanaan tersebut mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan pencapaian kompetensi warga belajar. Pemahaman yang mendalam ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan praktik terbaik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di PKBM, serta menjadi referensi bagi pembuatan kebijakan dan pengelolaan PKBM lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana implementasi perencanaan penilaian pembelajaran pada Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di PKBM GEMA?

1.3 Definisi Operasional

1.3.1 Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau proses yang dilakukan dalam merealisasikan suatu ide, rencana atau kebijakan yang sebelumnya telah disusun. Artinya implementasi mengubah suatu konsep yang ada menjadi tindakan nyata yang dilakukan di lapangan.

1.3.2 Perencanaan Penilaian Pembelajaran

Perencanaan penilaian pembelajaran adalah proses sistematis dalam merancang dan menentukan bagaimana, apa, kapan dan siapa yang terlibat dalam penilaian yang akan dilakukan. Proses perencanaan ini meliputi penentuan tujuan penilaian, pemilihan metode dan instrumen penilaian, penentuan kriteria penilaian dan penjadwalan penilaian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penilaian yang dilakukan relevan dengan tujuan pembelajaran dan dapat mengukur pencapaian kompetensi warga belajar secara akurat.

1.3.3 Penilaian Pembelajaran

Penilaian pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guna mengukur proses dan hasil belajar warga belajar untuk menentukan tingkat pencapaian kompetensi. Penilaian ini tidak berfokus pada hasil akhir, melainkan pada proses belajar mengajar yang dilakukan.

1.3.4 Program Pendidikan Kesetaraan Paket C

Program pendidikan kesetaraan Paket C adalah salah satu program yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan non formal. Program Paket C ini setara dengan SMA, artinya lulusan dari Program Paket C ini memiliki hak eligibilitas dan kedudukan hukum yang sama dengan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) sehingga warga belajar yang tidak memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan formal bisa tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.

1.3.5 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Pusat kegiatan belajar masyarakat atau yang disingkat PKBM merupakan salah satu lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan dan pendidikan kecakapan baik kecakapan kerja maupun kecakapan hidup.

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang sudah diajukan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi perencanaan penilaian pembelajaran pada Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di PKBM GEMA.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1.5.1 Kegunaan Teoritis

1.5.1.1 Untuk menambah referensi terhadap kajian teori mengenai implementasi perencanaan penilaian pada program pendidikan kesetaraan.

1.5.1.2 Untuk menambah referensi kajian teori mengenai perencanaan penilaian pembelajaran di pendidikan kesetaraan.

1.5.1.3 Untuk mengembangkan keilmuan Pendidikan Masyarakat khususnya pada kajian teori tentang perencanaan penilaian pembelajaran di satuan Pendidikan Non Formal.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1.5.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan wawasan, menambah pengetahuan dan keterampilan khususnya mengenai penelitian.

1.5.2.2 Bagi pihak PKBM

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi untuk mengelola satuan pendidikan.